

BAB III

MONOGRAFI LOKASI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum UIN Imam Bonjol Padang

3.1.1 Sejarah UIN Imam Bonjol Padang

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang sebagai penyelenggara pendidikan tinggi agama Islam memiliki posisi penting dan strategis di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Apalagi untuk daerah Sumatera Barat dengan budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan “Adat Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah. Syara’ Mangato dan Adat Mamakai”. Artinya, adat Minangkabau didasarkan kepada ajaran Islam dan nilai-nilai agama Islam diterima dan dilaksanakan oleh adat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang merupakan perubahan bentuk dari Institut Agama Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 (Perpres RI 2017, 1). Secara historis, keberadaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dimulai dengan keberadaan Fakultas Tarbiyah Padang Cabang UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang lahir berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 92 Tahun 1963 tanggal 21 September 1963. Fakultas Tarbiyah inilah yang menjadi cikal bakal didirikannya UIN Imam Bonjol Padang. Tiga tahun kemudian, tepatnya tanggal 29 Nopember 1966, berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 77 Tahun 1966 tanggal 21 November 1966 diresmikanlah berdirinya UIN Imam Bonjol Padang oleh Menteri Agama Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri. Dengan demikian tanggal tersebut menjadi hari lahir UIN Imam Bonjol Padang, yang waktu itu memiliki 4 fakultas dan 5 jurusan, yaitu, 1) Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama dan Jurusan Tadris di Padang, 2) Fakultas Syari’ah Jurusan Qadha (Hukum Islam) di Bukittinggi, 3) Fakultas Adab Jurusan Sastra Arab di Payakumbuh, dan 4) Fakultas

Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama di Padang Panjang.

Sepanjang 1968-1970 UIN Imam Bonjol Padang mengalami perkembangan, ditandai bertambahnya 1 fakultas dan 3 fakultas cabang, yaitu 1) Fakultas Dakwah di Solok, 2) Fakultas Tarbiyah cabang Batusangkar, 3) Fakultas Tarbiyah cabang Padang Sidempuan, dan 4) Fakultas Ushuluddin cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1973-1977 dalam rangka rasionalisasi Perguruan Tinggi Agama Islam, muncul kebijakan sentralisasi semua fakultas daerah ke pusatnya di Padang dan melepas Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin Cabang Padang Sidempuan. Pada tahun 1978 UIN Imam Bonjol Padang memiliki 5 fakultas di Padang dan 2 fakultas masing-masing di Bukittinggi dan Batusangkar dengan 14 jurusan.

Pada perkembangannya, hingga saat ini konversi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN), universitas memiliki 6 fakultas dengan 25 jurusan/program studi yang terdiri dari:

1. Fakultas Adab dan Humaniora, dengan Program Studi:
 - a. Bahasa dan Sastra Arab (S1)
 - b. Sejarah Peradaban Islam (S1)
 - c. Ilmu Perpustakaan (D3), dan
 - d. Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (S1).
2. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan Program Studi:
 - a. Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)
 - b. Bimbingan dan Konseling Islam (S1)
 - c. Manajemen Dakwah (S1), dan
 - d. Pengembangan Masyarakat Islam (S1).
3. Fakultas Syariah, dengan Program Studi:
 - a. Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal asy-Syakhshiyah) (S1)
 - b. Perbandingan Mazhab (S1)
 - c. Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) (S1), dan
 - d. Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) (S1).

4. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dengan Program Studi:

- a. Pendidikan Agama Islam (S1)
- b. Pendidikan Bahasa Arab (S1)
- c. Manajemen Pendidikan Islam (S1)
- d. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (S1)
- e. Tadris Bahasa Inggris (S1)
- f. Tadris Ilmu Pengetahuan Alam/ Fisika (S1)
- g. Tadris Matematika (S1)
- h. Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial/ Sejarah (S1)
- i. Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (S1), dan
- j. Pendidikan Profesi Guru (Profesi).

5. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, dengan Program Studi:

- a. Aqidah dan Filsafat Islam (S1)
- b. Studi Agama-Agama (S1)
- c. Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S1)
- d. Psikologi Islam (S1)
- e. Ilmu Hadis (S1), dan
- f. Tasawuf dan Psikoterapi (S1).

6. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan Program Studi:

- a. Ekonomi Syariah (S1)
- b. Manajemen Perbankan Syariah (D3)
- c. Akuntansi Syariah (S1)
- d. Perbankan Syariah (S1), dan
- e. Manajemen Bisnis Syariah (S1).

7. Fakultas Sains dan Teknologi, dengan Program Studi:

- a. Matematika (S1), dan
- b. Sistem Informasi (S1).

Selain jenjang S1 di atas, pada tahun 1994 didirikan pula jenjang Program Studi Pascasarjana (S2) dengan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 287 Tahun 1994 tanggal 1 Agustus 1994, disusul

oleh jenjang S3 atau Program Doktor. Program studi pascasarjana yang ada di UIN Imam Bonjol Padang, terdiri dari prodi S2-Pendidikan Agama Islam, S2-Pendidikan Bahasa Arab, S2-Ekonomi Syariah, S2- Hukum Keluarga (AS), S2-Pengembangan Masyarakat Islam, S2-Sejarah Kebudayaan Islam, S2-Ilmu Hadist, S2-Ilmu Al-Quran dan Tafsir, dan prodi S3-Pendidikan Islam, S3-Hukum Islam.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1985, tentang Pokok-pokok Organisasi UIN bahwa keberadaan UIN Imam Bonjol Padang sudah mempunyai landasan hukum yang kuat sebagai lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri yang setara dengan Perguruan Tinggi Umum Negeri, baik di bidang status, struktur organisasi, ketatalaksanaan akademis, administratif dan lain sebagainya. Pada tahun 1993, kelembagaan UIN Imam Bonjol Padang secara struktural dan akademis mengalami perkembangan, dan kemudian ditegaskan lagi dengan Keputusan Menteri Agama Nomor: 19 Tahun 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang. Seiring perkembangan maka dikeluarkan pula Permenag RI Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Imam Bonjol Padang, yang antara lain menjelaskan tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Dalam perkembangannya, UIN Imam Bonjol hingga saat ini telah memiliki sejumlah organ pengelola universitas dan fakultas serta organ pertimbangan. Kegiatan perkuliahan dan administrasi untuk jenjang S1 berada di kampus II Lubuk Lintah dan kampus III Sungai Bangek. Sedangkan untuk jenjang pascasarjana (S2 dan S3) berada di kampus I Jalan Sudirman. Pembangunan Kampus III Sungai Bangek saat ini telah dipergunakan untuk semua Fakultas kecuali Fakultas Tarbiyah (Website uinib.ac.id, 2025).

3.1.2 Letak Geografis UIN Imam Bonjol Padang

UIN Imam Bonjol berada di kota Padang, yang merupakan salah satu kawasan dengan jumlah penduduk muslim tertinggi di Indonesia. Ini memberikan kampus ini posisi penting sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam bidang agama Islam. Secara historis, keberadaan Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dimulai dari Hadirnya Fakultas Tarbiyah Padang yang merupakan cabang dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang didirikan berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 92 Tahun 1963 pada tanggal 21 September 1963 (Quipper, 2023).

Kampus UIN Imam Bonjol Padang terletak di tiga lokasi yang berbeda dalam Kota Padang, antara lain:

1. Kampus I berada di pusat kota Jalan Sudirman No. 15 Padang Pasir, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25153

Gambar 3.1

Denah Lokasi Kampus I UIN Imam Bonjol Padang



(Sumber: screenshot aplikasi Google Maps)

2. Kampus II berada di Jalan. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Anduring, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153

Gambar 3.2

Denah Lokasi Kampus II UIN Imam Bonjol Padang



(Sumber: screenshot aplikasi Google Maps)

3. Kampus III berada di Sungai Bangek, Kel. Balai Gadang, Kec. Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat 25174

Gambar 3.3

Denah Lokasi Kampus III UIN Imam Bonjol Padang



(Sumber: screenshot aplikasi Google Maps)

3.1.3 Visi, Misi dan Tujuan UIN Imam Bonjol Padang

1. Visi UIN Imam Bonjol Padang

“Menjadi Universitas Islam yang Kompetitif di Asean dalam Membangun Masyarakat yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul Tahun 2040”.

2. Misi UIN Imam Bonjol Padang

- (1) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- (2) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- (3) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

3. Tujuan UIN Imam Bonjol Padang

Kementerian Agama menetapkan 3 (Tiga) tujuan yaitu:

- (1) Penguatan kualitas moderasi beragama dan kerukunan beragama;
- (2) Peningkatan lulusan pendidikan yang produktif dan memiliki daya saing komparatif;
- (3) Peningkatan budaya birokrasi pemerintahan yang bersih, melayani dan responsif (Website uinib.ac.id, 2025).

3.1.4 Periodesasi Kepemimpinan UIN Imam Bonjol Padang

Selama perjalanan dan perkembangannya, UIN Imam Bonjol Padang sudah mengalami 18 priodesasi kepemimpinan: 17 periodesasi ketika masih UIN dan 1 periodesasi setelah konversi alih status menjadi UIN, sebagaimana dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.1
Periodesasi Kepemimpinan Rektor UIN Imam Bonjol Padang

No	Nama Rektor	Waktu	Keterangan
1.	Prof. Dr. Mahmud Yunus	1966–1971	Rektor
2.	H. Mansur Datuk Nagari Basa	Februari–Juli 1971	Ketua Presidium
3.	H. Baharuddin Syarif	Agustus–Nov 1971	Rektor
4.	H. Hasnawi Karim	1971–1972	Caretaker Rektor
5.	Drs. Soufyan Ras Burhany	1973–1975	Ketua Presidium
6.	Drs. H. Fauzan, MA	1975–1976	Ketua Presidium
7.	Drs. M. Sanusi Latief	1976–1982	Rektor
8.	H. Hasnawi Karim	1982–1983	Caretaker Rektor
9.	Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin	1983–1992	Rektor
10.	Dr. H. Mansur Malik	1992–1997	Rektor
11.	Prof. Dr. H. Abdul Aziz Dahlan	1997–2001	Rektor
12.	Prof. Dr. H. Maidir Harun	2001–2006	Rektor
13.	Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar, M.A.	2006–Feb 2007	Pgs. Rektor

1 4 .	Prof. Dr. H. Sirajuddin Zar, M.A.	2007–2011	Rektor
1 5 .	Prof. Dr. H. Makmur Syarif, S.H., M.Ag.	2011–2015	Rektor
1 6 .	Prof. Dr. H. Asasriwarni, M.A.	Maret–Juli 2015	Pgs. Rektor
1 7 .	Prof. Dr. H. Eka Putra Wirman, Lc., M.A.	2015–2021	Rektor
1 8 .	Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd	2021–sekarang	Rektor

(Website uinib.ac.id, 2025).

Tabel ini merangkum riwayat kepemimpinan UIN Imam Bonjol Padang dari tahun 1966 hingga 2025, mencantumkan nama, periode jabatan, dan status jabatan seperti Rektor, Ketua Presidium, atau Caretaker. Daftar ini mencerminkan evolusi kepemimpinan sejak pendirian institusi sebagai IAIN Imam Bonjol hingga menjadi UIN pada 2013. Tabel ini menyoroti kontinuitas kepemimpinan, dengan Prof. Martin Kustati sebagai Rektor perempuan pertama sejak 2021 dan terpilih kembali hingga Tahun 2029 mendatang (Website uinib.ac.id, 2025).

3.1.5 Struktur Organisasi UIN Imam Bonjol Padang

Berikut ini Gambar Struktur Organisasi Uin Imam Bonjol Padang:

Gambar 3.4
Struktur Organisasi UIN Imam Bonjol Padang



(Sumber: website uinib.ac.id, 2025)

Struktur organisasi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang menggambarkan hierarki kepemimpinan dan unit-unit utama di bawah Rektor Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., untuk periode 2025-2029. Tingkat puncak Rektor memimpin secara keseluruhan, didukung oleh tiga Wakil Rektor yang bertanggung jawab atas bidang spesifik: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan (Prof. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D), Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan (Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag), serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama (Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D). Struktur ini memastikan pembagian tugas strategis di tingkat eksekutif universitas.

Fakultas utama diagram menunjukkan cabang ke berbagai fakultas seperti Fakultas Adab dan Humaniora (Dekan: Prof. Dr. Taufiqurrahman, M.Hum., M.Ag), Fakultas Syariah (Dekan: Dr. Alfadli,

M.Ag), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (Dekan: Prof. Dr. H. Yasmadi, M.Ag), serta Fakultas Ushuluddin (Dekan: Dr. Sefriyono, M.Pd). Setiap fakultas kemungkinan memiliki sub-struktur seperti departemen atau program studi di bawah dekan. Unit pendukung bagian bawah mencakup lembaga seperti Program Pascasarjana (Direktur: Prof. H. Ahmad Wira, M.Ag., Ph.D.), Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Ketua: Dr. Wakidul Kohar, M.Ag.), serta Lembaga Penjaminan Mutu (Ketua: Dr. Hermawati, M.Si.). Elemen-elemen ini mendukung fungsi riset, mutu, dan pengembangan akademik secara keseluruhan (Website uinib.ac.id, 2025).

3.2 Profil Pegawai UIN Imam Bonjol Padang yang Menggunakan Mobil Dinas Berbahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi

Pegawai UIN Imam Bonjol Padang yang menggunakan mobil dinas berbahan bakar minyak (BBM) bersubsidi terdiri atas pejabat struktural dan pejabat fungsional yang memiliki tugas kedinasan serta membutuhkan sarana transportasi untuk menunjang pelaksanaan tugas. Mobil dinas tersebut digunakan untuk mendukung mobilitas dalam menjalankan kegiatan administrasi, koordinasi, pelayanan akademik, pengawasan, dan kegiatan kedinasan lainnya.

Penggunaan mobil dinas pada dasarnya berkaitan dengan kedudukan, tanggung jawab, dan intensitas mobilitas masing-masing pejabat. Oleh karena itu, tidak seluruh pegawai menggunakan mobil dinas dengan frekuensi dan tujuan yang sama. Pejabat yang memiliki tanggung jawab lebih luas dan tugas Koordinatif cenderung memiliki kebutuhan mobilitas yang lebih tinggi dibandingkan pejabat lainnya.

Berdasarkan struktur organisasi dan jabatan yang terdapat di UIN

Imam Bonjol Padang, pegawai atau pejabat yang menggunakan mobil dinas berbahan bakar BBM bersubsidi dalam penelitian ini meliputi:

1. Wakil Rektor I

Wakil Rektor merupakan pejabat yang membantu Rektor dalam menjalankan tugas sesuai dengan bidang masing-masing. Wakil Rektor di UIN Imam Bonjol Padang terdiri atas Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, dan Wakil Rektor III. Wakil Rektor I bertanggung jawab terhadap bidang akademik dan kelembagaan akademik. Mobil dinas digunakan untuk mendukung kegiatan koordinasi dengan fakultas, program studi, lembaga, serta unit kerja lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan, seperti menghadiri rapat, melaksanakan koordinasi, melakukan pengawasan, menghadiri kegiatan resmi, serta melaksanakan tugas kelembagaan lainnya. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Nurus Shalihin, selaku wakil Rektor I, ia mengatakan bahwa:

"Biasanya saya pakai untuk keperluan dinas sehari-hari. Saya biasanya berangkat dari rumah dinas ke kantor untuk urusan administrasi dan koordinasi, lalu kendaraan digunakan untuk memenuhi undangan instansi atau mitra saat melaksanakan pengabdian, misalnya mengantar dan mendampingi mahasiswa KKN, mahasiswa PL, serta kegiatan lainnya yang berbaur pengabdian kepada masyarakat. Mobil ini juga sering dipakai untuk antar-jemput tim atau narasumber, membawa logistik dan peralatan ke lokasi, melakukan survei lapangan, dan untuk dinas luar kota bila diperlukan" (Shalihin, 2026).

Berdasarkan keterangan Bapak Nurus Shalihin, penggunaan kendaraan dinas diprioritaskan untuk kepentingan institusional dan operasional pengabdian mulai dari urusan administrasi di kantor, memenuhi undangan instansi/mitra, mengantar dan mendampingi mahasiswa KKN/PL, hingga mengangkut logistik, antar-jemput tim

atau narasumber, melakukan survei lapangan, dan dinas luar kota

2. Kepala Biro

Kepala Biro merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam membantu pelaksanaan administrasi universitas. Kepala Biro memiliki peran dalam mengoordinasikan berbagai urusan administratif sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Mobil dinas yang digunakan oleh Kepala Biro mendukung pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan, pelayanan administrasi, serta hubungan kerja dengan berbagai unit di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Penggunaan mobil dinas tersebut tidak terlepas dari kebutuhan operasional dalam melaksanakan tugas kelembagaan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Muhammad Nur, selaku kepala Biro AUPK, ia mengatakan bahwa:

“Pertama dari rumah dinas ke kantor, kemudian memenuhi undangan pemerintah, untuk melakukan pengabdian seperti pengantaran mahasiswa KKN, pengabdian masyarakat (Nur, 2026).

Berdasarkan keterangan Bapak Muhammad Nur, Kepala Biro AUPK, mobil dinas digunakan sebagai fasilitas penunjang pelaksanaan tugas mulai dari keberangkatan dari rumah dinas ke kantor hingga memenuhi undangan pemerintah untuk kegiatan pengabdian seperti pengantaran mahasiswa KKN, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan terkait lainnya sehingga penggunaannya bukan sekadar transportasi pribadi tetapi bagian dari tanggung jawab dan mobilitas pejabat dalam menjalankan fungsi kelembagaan.

3.3 Gambaran Umum Kendaraan Dinas UIN Imam Bonjol Padang

3.3.1 Pengertian Mobil atau Kendaraan Dinas

Mobil atau kendaraan dinas merupakan salah satu sarana yang disediakan oleh instansi pemerintah untuk menunjang pelaksanaan tugas dan

kegiatan kedinasan. Keberadaan kendaraan dinas tidak hanya berfungsi sebagai alat transportasi, tetapi juga menjadi fasilitas yang membantu pejabat maupun pegawai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kendaraan merupakan salah satu jenis barang yang penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta fungsi organisasi. Oleh karena itu, kendaraan dinas pada dasarnya berkaitan dengan kepentingan kedinasan dan pelaksanaan tugas instansi, bukan semata-mata sebagai fasilitas transportasi pribadi (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Penggunaan kendaraan dinas juga tidak dapat dipisahkan dari kedudukan kendaraan tersebut sebagai bagian dari Barang Milik Negara. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 mengatur mengenai standar barang dan standar kebutuhan BMN, termasuk kendaraan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Kendaraan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan jabatan maupun kebutuhan operasional suatu satuan kerja. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kendaraan dinas mempunyai hubungan dengan pelaksanaan tugas kelembagaan sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara tepat dan sesuai dengan peruntukannya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Dalam lingkungan UIN Imam Bonjol Padang, kendaraan dinas merupakan salah satu fasilitas yang digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan universitas. Kendaraan tersebut berada dalam pengelolaan universitas dan digunakan oleh pejabat atau pegawai yang memiliki tanggung jawab terhadap kendaraan tertentu. Berdasarkan Daftar Kendaraan Dinas Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2025, setiap kendaraan dicatat berdasarkan nomor polisi, jenis kendaraan, tahun kendaraan, bulan pajak, jumlah pajak, penanggung jawab, dan jabatan penanggung jawab. Pencatatan

tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dinas merupakan fasilitas kelembagaan yang penggunaannya memiliki pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemanfaatannya (UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Dengan demikian, mobil atau kendaraan dinas dapat dipahami sebagai sarana transportasi yang berada dalam penguasaan suatu instansi dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kedinasan. Penggunaan kendaraan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga, memelihara, serta menggunakan kendaraan sesuai dengan kebutuhan kedinasan. Hal tersebut menjadi penting karena kendaraan dinas merupakan fasilitas yang berasal dari aset negara sehingga penggunaannya perlu dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

3.3.2. Kegunaan Mobil atau Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas pada dasarnya digunakan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan kedinasan. Mobilitas menjadi salah satu kebutuhan penting dalam pelaksanaan pekerjaan, terutama bagi pejabat dan pegawai yang harus melakukan perjalanan dalam rangka menjalankan tugas, menghadiri kegiatan, melakukan koordinasi, maupun melaksanakan kegiatan operasional lainnya. Oleh sebab itu, kendaraan dinas menjadi salah satu sarana yang dapat membantu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara lebih terarah. Penggunaan kendaraan sebagai bagian dari BMN juga perlu disesuaikan dengan standar kebutuhan dan fungsi organisasi yang bersangkutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Kegunaan kendaraan dinas di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang dapat dilihat dari keberagaman kendaraan yang tercantum dalam daftar kendaraan tahun 2025. Dalam daftar tersebut terdapat berbagai jenis kendaraan, seperti Avanza, Innova, Vios, Accord, Altis, Fortuner, Hiace,

Mitsubishi Bus, Isuzu Bus, Jet Bus, Hino Bus, ambulance, pickup, dumtruck, serta kendaraan roda dua seperti Viar dan Honda. Keberagaman tersebut menunjukkan bahwa kendaraan yang tersedia tidak hanya digunakan untuk satu jenis kebutuhan, tetapi dapat menunjang berbagai kegiatan sesuai dengan karakteristik kendaraan dan kebutuhan unit kerja masing-masing (UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Kendaraan penumpang seperti Avanza, Innova, Vios, Fortuner, dan jenis kendaraan lainnya dapat digunakan untuk mendukung mobilitas pejabat maupun pegawai dalam menjalankan tugas kedinasan. Sementara itu, kendaraan seperti bus memiliki kapasitas yang lebih besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang membutuhkan transportasi bagi sejumlah orang. Kendaraan pickup dan dumtruck dapat digunakan untuk kebutuhan operasional yang berkaitan dengan pengangkutan barang, sedangkan ambulance memiliki fungsi khusus dalam mendukung kebutuhan pelayanan kesehatan. Dengan demikian, jenis kendaraan yang beragam tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kendaraan dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas.

Penggunaan kendaraan dinas juga menimbulkan kebutuhan terhadap pemeliharaan dan biaya operasional. Kendaraan yang digunakan untuk menjalankan tugas kedinasan membutuhkan bahan bakar, perawatan, pembayaran pajak, serta berbagai kebutuhan lainnya agar tetap dapat digunakan dengan baik. Pengelolaan BMN pada dasarnya mencakup kegiatan penggunaan dan pemeliharaan barang sehingga aset negara dapat tetap berada dalam kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas instansi (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Dengan demikian, pengguna kendaraan dinas tidak hanya berkewajiban menggunakan kendaraan sesuai kebutuhan, tetapi juga perlu memperhatikan pemeliharaan dan penggunaan

biaya operasionalnya.

Dalam penelitian ini, kegunaan kendaraan dinas menjadi penting untuk dibahas karena salah satu kebutuhan operasional kendaraan adalah bahan bakar minyak (BBM). Kendaraan yang digunakan untuk menjalankan tugas kedinasan membutuhkan bahan bakar sesuai dengan jenis dan kebutuhan kendaraan tersebut. Kondisi inilah yang kemudian berkaitan dengan fokus penelitian mengenai pembelian BBM bersubsidi oleh pengguna kendaraan dinas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kegunaan kendaraan dinas dapat menjadi dasar untuk memahami hubungan antara penggunaan kendaraan sebagai fasilitas kedinasan dengan kebutuhan operasional yang muncul selama kendaraan tersebut digunakan.



3.3.3 Data Keseluruhan Kendaraan Dinas UIN Imam Bonjol Padang

Gambar 3.4
Data Kendaraan Dinas UIN Imam Bonjol Padang

NO	NOPOL	JENIS KENDARAAN	TAHUN KENDARAAN	BULAN	PAJAK	PEMANGGUNG JAWAB	JABATAN
1	BA 1906 AE	AVANZA	2007	JANUARI	Rp620.800	KELUANGGAN	KABAG. KEUANGAN
2	BA 7267 A	MTSLSR39 (BUS PUTIH)	2005	JANUARI	Rp1.029.300	NELDAWATI	KABAG. UMUM
3	BA 132	INNOVA	2021	JANUARI	Rp2.431.800	LUNMAMU. HAKIM	WR 2
4	BA 7143 A	FIACE	2021	JANUARI	Rp3.515.800	NELDAWATI	KABAG. UMUM
5	BA 7305 A	ISUZU (BUS BTH)	2020	JANUARI	Rp2.218.900	NELDAWATI	KABAG. UMUM
6	BA 5842 Q	BENTON VIAR	2023	JANUARI	Rp240.100	NELDAWATI	KABAG. UMUM
7	BA 7271 A	JET BUS	2023	JANUARI	Rp1.964.300	NELDAWATI	KABAG. UMUM
8	BA 13	ACCORD	2017	FEBRUARI	Rp4.286.200	MARTIN KUSTATI	REKTOR
9	BA 1587 AX	AL TIS	2008	MARET	Rp1.658.700	NELDAWATI	KABAG. UMUM
10	BA 1180 B	AVANZA	2020	MARET	Rp1.865.700	WIRKARTAHAR	LIFT BENDAH
11	BA 1621 Q	VCIS	2010	MARET	Rp1.563.800	AHMAZAH	KETUA SPNAT
12	BA 1635 Q	VCIS	2010	MARET	Rp1.563.800	FADLI	KOPERTAS
13	BA 1778 Q	VCIS	2010	MARET	Rp1.563.800	TALIF IQUNNAHMAN	DEKAN FAK
14	BA 1018 B	VCIS	2010	MARET	Rp1.563.800	AHMAD WIRA	DIREKTUR PASCASARJANA
15	BA 7261 B	HINO (BUS B3)	2018	APRIL	Rp1.900.500	NELDAWATI	KABAG. UMUM
16	BA 2322 AK	HONDA NF 125 SD	2006	MEI	Rp275.900	UMUM	STAF BAG. UMUM
17	BA 4613 QD	HONDA TURBO STRONO X	2008	MEI	Rp230.800	NELDAWATI	KABAG. UMUM
18	BA 8561 A	SUZUKI (AMBULAN)	2010	MEI	Rp1.178.700	NELDAWATI	KABAG. UMUM
19	BA 5209 B	AVANZA	2020	MEI	Rp1.865.700	NELDAWATI	KABAG. UMUM
20	BA 1307 A	AVANZA	2018	MEI	Rp1.505.300	NELDAWATI	KABAG. UMUM
21	BA 1432 A	INNOVA	2019	MEI	Rp2.198.800	FULIA	DEKAN FST
22	BA 8081 A	PICK UP L300	2018	MEI	Rp1.287.800	NELDAWATI	KABAG. UMUM
23	BA 7108 A	MITSUBISHI (BUS JAMA)	1991	JUNI	Rp338.000	NELDAWATI	KABAG. UMUM
24	BA 8304 A	HILUX	2022	JUNI	Rp3.398.100	MUHAMMAD NURI	BRO ALPK
25	BA 8489 A	CUMTRUK (CANTER)	2024	JULI	Rp2.848.800	NELDAWATI	KABAG. UMUM
26	BA 7268 A	JET BUS	2023	AUGUSTUS	Rp1.908.200	NELDAWATI	KABAG. UMUM
27	BA 1563 B	INNOVA	2013	SEPTEMBER	Rp1.947.100	HAIRANI INDERA	KASUBAG. PASCASARJANA
28	BA 1860 B	FORTUNER	2013	SEPTEMBER	Rp3.042.700	MASAMUNI MAHATMA	BRO AARI
29	BA 1882 AW	AVANZA	2007	SEPTEMBER	Rp727.600	SAG KETILJA SAMA	HUMAS
30	BA 8884 AL	HONDA SUPRA X 125	2007	SEPTEMBER	Rp128.300	HAIRANI INDERA	KASUBAG. PASCASARJANA
31	BA 1653 QY	AVANZA	2024	SEPTEMBER	Rp721.600	NELDAWATI	KABAG. UMUM
32	BA 1762 QD	AVANZA	2024	SEPTEMBER	Rp721.600	HABSI HEDAYAT	KABAG. FTK
33	BA 5104 B	BENTON VIAR	2022	SEPTEMBER	Rp338.700	NELDAWATI	KABAG. UMUM
34	BA 1455 QY	AVANZA	2024	SEPTEMBER	Rp721.600	ARPIYA YESRI	KABAG. AKADEMIK
35	BA 1434 QY	AVANZA	2024	SEPTEMBER	Rp721.600	ALMUNGO HERLINDA	KORDO. KEPERAWATAN
36	BA 7252 B	FIACE	2017	OKTOBER	Rp1.889.850	NELDAWATI	KABAG. UMUM
37	BA 1456 QY	AVANZA	2024	OKTOBER	Rp721.600	NELDAWATI	KABAG. UMUM
38	BA 2021 B	HONDA GL 15 AJRH	2011	NOVEMBER	Rp91.000	AFNIDA NENOLAH	KABAG. FEBI
39	BA 3020 B	HONDA GL 15 AJRH	2011	NOVEMBER	Rp91.000	umum	STAF BAG. UMUM
40	BA 3019 B	HONDA GL 15 AJRH	2011	NOVEMBER	Rp91.000	SANDAL PUTRA	KABAG. FST
41	BA 1945 A	INNOVA	2012	DESEMBER	Rp253.400	BAHYAS	KOPERTAS
42	BA 1243 Q	INNOVA	2012	DESEMBER	Rp207.400	WANGUL KIHARI	KEPALA LPM
43	BA 1628 Q	VCIS	2010	DESEMBER	Rp227.750	HERMAWATI	KEPALA LPM
44	BA 1273 B	INNOVA	2010	DESEMBER	Rp278.350	TESTRU HENDRA	KABAG. UMUM
45	BA 1274 B	INNOVA	2010	DESEMBER	Rp278.350	MURDAL	DEKAN FOSK
46	BA 1271 B	INNOVA	2010	DESEMBER	Rp278.350	Wahyu	Ketua SPI
47	BA 1270 B	INNOVA	2010	DESEMBER	Rp278.350	SEFRYONO	DEKAN FUSA
48	BA 1272 B	INNOVA	2010	DESEMBER	Rp278.350	ALFADLI	DEKAN SYARAH
49	BA 1026 A	INNOVA	2021	DESEMBER	Rp1.218.200	YASMAZI	DEKAN FTK
50	BA 134	INNOVA	2021	DESEMBER	Rp1.181.000	NURUS SHALEEN	WR 1
51	BA 1024 A	FORTUNER FRL	2021	DESEMBER	Rp1.806.800	MARTIN KUSTATI	REKTOR
52	BA 130	INNOVA	2021	DESEMBER	Rp1.151.000	NELDAWATI	WR 2
TOTAL PAJAK					Rp49.881,800		

PEMANGGUNG JAWAB
KASUBAG. UMUM DAN KETUMAHANDAGAAN

PADANG, 18 AGUSTUS 2025
PENDELIDLA LAYANAN OPERASIONAL

FAJRI HEDAYAT
190104052011011009

MUHAMMAD RIDHA
190208182006101001

MENGETAHUI
KABAG. UMUM DAN BMM

NELDAWATI
1809020199032001

Berdasarkan Daftar Kendaraan Dinas Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun 2025, terdapat 52 unit kendaraan yang tercatat dalam

daftar tersebut. Data tersebut memuat informasi mengenai nomor polisi, jenis kendaraan, tahun kendaraan, bulan pajak, jumlah pajak, penanggung jawab, dan jabatan penanggung jawab. Adanya pencatatan tersebut memberikan gambaran mengenai keseluruhan kendaraan yang berada dalam pengelolaan universitas sekaligus menunjukkan pihak-pihak yang diberikan tanggung jawab terhadap kendaraan tersebut (UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Jika dilihat berdasarkan jenisnya, kendaraan yang tercatat cukup beragam. Dalam daftar tersebut terdapat kendaraan seperti Avanza, Innova, Vios, Accord, Altis, Fortuner, Hiace, Mitsubishi Bus, Isuzu Bus, Jet Bus, Hino Bus, ambulance, pickup, dumtruck, Viar, dan Honda. Keberagaman jenis kendaraan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dinas yang tersedia digunakan untuk menunjang kebutuhan yang berbeda-beda. Kendaraan penumpang dapat digunakan untuk mendukung mobilitas pejabat atau pegawai, kendaraan berkapasitas besar dapat menunjang kegiatan yang melibatkan banyak orang, sedangkan kendaraan tertentu dapat digunakan untuk kebutuhan operasional yang lebih khusus (UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Dilihat dari tahun kendaraan, data tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dinas UIN Imam Bonjol Padang memiliki tahun kendaraan yang beragam, mulai dari tahun 1991 sampai tahun 2024. Kendaraan tahun 1991 yang tercatat dalam daftar adalah Mitsubishi Bus Lama dengan nomor polisi BA 7108 A, sedangkan kendaraan tahun 2024 yang tercatat adalah Dumtruk (Canter) dengan nomor polisi BA 8499 A. Selain itu, terdapat kendaraan yang berasal dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Perbedaan tahun tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dinas yang tersedia diperoleh dalam periode yang berbeda sehingga memiliki usia kendaraan yang beragam (UIN

Imam Bonjol Padang, 2025).

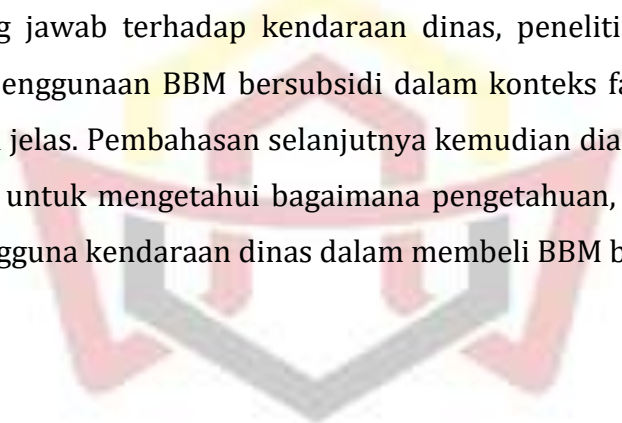
Dari sisi penanggung jawab, kendaraan dinas tersebut berada di bawah tanggung jawab berbagai pejabat dan pegawai di lingkungan UIN Imam Bonjol Padang. Dalam daftar tersebut terdapat nama dan jabatan seperti Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kabag Umum, Kepala LPM, Kepala LP2M, Ketua Senat, Kepala UPT, serta pejabat lainnya. Salah satu pihak yang tercatat sebagai penanggung jawab terhadap sejumlah kendaraan adalah Neldawati selaku Kabag Umum. Adanya pencantuman nama dan jabatan tersebut menunjukkan bahwa kendaraan dinas tidak digunakan tanpa adanya pihak yang bertanggung jawab, tetapi terdapat pengelola atau pengguna yang berkaitan dengan masing-masing kendaraan (UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Selain data mengenai jenis, tahun, dan penanggung jawab kendaraan, dokumen tersebut juga memuat jumlah pajak kendaraan. Berdasarkan keseluruhan daftar, total pajak kendaraan yang tercatat adalah Rp69.681.950. Pembayaran pajak tersebut tercatat pada berbagai bulan selama tahun 2025, mulai dari Januari hingga Desember. Data tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan kendaraan dinas tidak hanya berkaitan dengan penggunaannya sebagai sarana transportasi, tetapi juga mencakup kewajiban administratif dan pembiayaan yang harus diperhatikan oleh pihak universitas (UIN Imam Bonjol Padang, 2025).

Berdasarkan keseluruhan data tersebut, dapat diketahui bahwa kendaraan dinas UIN Imam Bonjol Padang merupakan fasilitas kelembagaan yang terdiri atas berbagai jenis kendaraan, memiliki tahun kendaraan yang berbeda-beda, serta berada di bawah tanggung jawab pejabat atau pegawai dari berbagai unit kerja. Keberadaan data tersebut menunjukkan pentingnya pengelolaan kendaraan secara tertib agar fasilitas yang dimiliki universitas dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

Pengelolaan BMN sendiri pada prinsipnya mencakup penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penatausahaan barang sehingga keberadaan aset dapat mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan atau kelembagaan (Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Data mengenai keseluruhan kendaraan dinas tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penelitian mengenai pembelian BBM bersubsidi oleh pengguna kendaraan dinas. Hal ini karena penggunaan kendaraan secara langsung berkaitan dengan kebutuhan bahan bakar sebagai salah satu komponen operasional. Dengan mengetahui jumlah, jenis, dan pihak yang bertanggung jawab terhadap kendaraan dinas, penelitian dapat melihat persoalan penggunaan BBM bersubsidi dalam konteks fasilitas kedinasan secara lebih jelas. Pembahasan selanjutnya kemudian diarahkan pada hasil wawancara untuk mengetahui bagaimana pengetahuan, pemahaman, dan praktik pengguna kendaraan dinas dalam membeli BBM bersubsidi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG